

## IMPLEMENTASI ASAS KEADILAN DAN PEMERATAAN DALAM PEMBAGIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI DESA PASEBAN TEBO

Dinda Afriani<sup>1</sup>, Putri Apria Ningsih<sup>2</sup>, Rabiyyatul Alawiyah<sup>3</sup>  
[dindaapriani158@gmail.com](mailto:dindaapriani158@gmail.com)<sup>1</sup>, [putriaprianingsih@uinjambi.ac.id](mailto:putriaprianingsih@uinjambi.ac.id)<sup>2</sup>,  
[rabiyyatulalawiyah@uinjambi.ac.id](mailto:rabiyyatulalawiyah@uinjambi.ac.id)<sup>3</sup>  
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi

### ABSTRAK

Data penerima bantuan yang tidak akurat menjadi masalah besar dalam penyaluran bantuan pemerintah. Sering kali, data yang digunakan tidak terintegrasi antar instansi atau tidak diperbarui dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi asas keadilan dan pemerataan dalam pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Paseban, mengetahui dampak ekonomi penerimaan bantuan terhadap masyarakat, serta merumuskan cara menanggulangi ketidakmerataan dalam penyaluran BLT berdasarkan perspektif Ekonomi Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai instrumen pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi asas keadilan dan pemerataan dalam penyaluran BLT di Desa Paseban sudah berjalan sesuai prinsip yang ditetapkan pemerintah, meskipun masih terdapat kendala berupa ketidakakuratan data penerima dan persepsi subjektif masyarakat mengenai keadilan distribusi. Dampak ekonomi dari penerimaan BLT cukup signifikan bagi masyarakat penerima, terutama dalam meningkatkan daya beli dan pemenuhan kebutuhan pokok, namun manfaatnya bersifat sementara dan belum mampu menciptakan kemandirian ekonomi. Dalam perspektif Ekonomi Islam, penanggulangan ketidakmerataan penyaluran BLT dapat dilakukan melalui penerapan prinsip keadilan (*al-'adl*), amanah (*al-amānah*), dan musyawarah (*asy-syūrā*), dengan menekankan transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pendataan serta pengawasan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyaluran BLT di Desa Paseban telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Optimalisasi dapat dicapai melalui perbaikan sistem pendataan, peningkatan transparansi, serta penerapan nilai-nilai Ekonomi Islam sebagai landasan etis dalam distribusi bantuan.

**Kata Kunci:** Keadilan, Pemerataan, BLT.

### ABSTRACT

*Inaccurate recipient data is a major problem in the distribution of government aid. Often, the data used is not integrated across agencies or is not properly updated. This research aims to analyze the implementation of the principles of justice and equity in the distribution of Direct Cash Assistance (BLT) in Paseban Village, to examine the economic impact of receiving the assistance on the community, and to formulate ways to overcome inequality in its distribution from the perspective of Islamic Economics. The research method used is qualitative with a descriptive approach, employing interviews, observations, and documentation as data collection instruments. The findings show that the implementation of justice and equity in the distribution of BLT in Paseban Village has generally followed the principles set by the government, although some challenges remain, such as inaccurate recipient data and subjective perceptions of fairness among the community. The economic impact of BLT is relatively positive, as it improves the purchasing power of beneficiary households and helps meet their basic needs. However, its benefits are temporary and insufficient to create long-term economic independence. From the perspective of Islamic Economics, inequality in BLT distribution can be addressed by applying the principles of justice (*al-'adl*), trustworthiness (*al-amānah*), and consultation (*asy-shūrā*), emphasizing transparency and community involvement in the verification and monitoring processes. In conclusion, the distribution of BLT in Paseban Village has been implemented but has not yet*

*achieved optimal results. Optimization can be realized through improvements in data accuracy, increased transparency, and the application of Islamic economic values as an ethical foundation for fair distribution.*

**Keywords:** Justice, Equity, BLT.

## **PENDAHULUAN**

Secara umum, setiap manusia menginginkan kehidupan yang sejahtera, baik secara individu maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itu, persoalan ekonomi selalu menjadi perhatian utama. Dalam praktiknya, aktivitas ekonomi sering menimbulkan ketimpangan sosial, baik dalam sistem kapitalis maupun sosialis. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup, tetapi harus disertai dengan prinsip keadilan dan pemerataan agar kesejahteraan dapat dirasakan secara luas.

Secara konseptual, implementasi merupakan tahapan penting dalam proses kebijakan publik setelah perumusan dan pengesahan kebijakan. Menurut Charles O. Jones, implementasi adalah proses membangun keterkaitan antara tujuan kebijakan dan hasil yang ingin dicapai melalui tindakan nyata. Artinya, keberhasilan suatu kebijakan, termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), sangat bergantung pada bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan di lapangan.

Dalam konteks ekonomi, permasalahan utama bukan hanya pada produksi, tetapi pada distribusi sumber daya secara adil. Pertumbuhan ekonomi tidak selalu otomatis menurunkan kemiskinan, karena tanpa distribusi yang merata, ketimpangan justru semakin meningkat. Kemiskinan sendiri dipahami sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar secara layak. Oleh karena itu, kebijakan sosial seperti BLT menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi dan perlindungan masyarakat rentan.

Program BLT di Indonesia mulai diterapkan pada tahun 2005 sebagai respons kenaikan harga BBM dan kembali diperluas pada masa pandemi COVID-19 melalui kebijakan keuangan negara tahun 2020. BLT merupakan program jaring pengaman sosial yang bersifat sementara, bertujuan menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai persoalan seperti ketidaktepatan sasaran, data yang tidak terbaru, tumpang tindih penerima, kurangnya transparansi, serta rendahnya efektivitas dan efisiensi distribusi.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa asas keadilan dan pemerataan belum sepenuhnya terwujud. Dalam perspektif fiqh siyāsah, pelaksanaan BLT termasuk dalam konsep siyāsah tanfidziyah, yaitu kebijakan pemerintah yang bertujuan menciptakan kemaslahatan. Akan tetapi, ketika bantuan tidak tepat sasaran, maka tujuan kesejahteraan (falah) tidak tercapai secara optimal.

Dalam ekonomi Islam, keadilan (‘adl) berarti menempatkan sesuatu sesuai hak dan proporsinya. Prinsip ini menuntut distribusi bantuan berbasis kebutuhan, tanpa diskriminasi politik, keluarga, atau golongan, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses seleksi. Pemikir seperti Sayyid Qutb menegaskan bahwa keadilan dalam Islam mencakup aspek ekonomi, sosial, dan spiritual, serta menolak penumpukan kekayaan pada segelintir orang. Hal ini sejalan dengan gagasan Muhammad Umer Chapra yang menekankan distribusi melalui mekanisme zakat dan kebijakan negara yang adil untuk mencegah konsentrasi kekayaan.

Jika dikaitkan dengan teori keadilan modern, pemikiran John Rawls dalam *A Theory of Justice* relevan dengan prinsip pemerataan dalam BLT. Rawls menyatakan bahwa ketimpangan hanya dapat dibenarkan apabila menguntungkan kelompok paling tidak beruntung (difference principle). Artinya, distribusi tidak harus sama rata, tetapi harus memprioritaskan kelompok paling lemah. Sementara itu, John Stuart Mill melalui teori

utilitarianisme menekankan kesejahteraan terbesar bagi sebanyak mungkin orang, meskipun pendekatan ini berpotensi mengabaikan minoritas.

Dalam praktiknya, ketidakmerataan BLT menimbulkan dampak sosial dan ekonomi. Secara sosial, muncul kecemburuan, konflik horizontal, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat desa. Secara ekonomi, tujuan peningkatan daya beli masyarakat miskin tidak tercapai apabila bantuan justru diterima oleh pihak yang tidak berhak. Dalam jangka panjang, ketidakmerataan dapat memperlemah kohesi sosial dan menghambat pembangunan desa.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan implementasi yang adil dan merata diperlukan:

1. Pembaruan dan integrasi data penerima secara berkala.
2. Transparansi kriteria dan proses seleksi.
3. Musyawarah desa sebagai forum partisipatif.
4. Pengawasan dan akuntabilitas dalam penyaluran dana.

Dengan demikian, implementasi BLT yang sesuai dengan prinsip keadilan distributif dalam ekonomi Islam dan teori keadilan modern tidak hanya berorientasi pada penyaluran dana, tetapi juga pada pencapaian kesejahteraan sosial yang menyeluruh. Pemerintah sebagai pemegang amanah wajib memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai kepada yang berhak, sehingga tujuan utama kebijakan—yaitu terciptanya keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan—dapat terwujud secara nyata.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang akan digunakan adalah jenis metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, guna untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan metode serupa. dengan tujuan untuk menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **a. Implementasi Asas Keadilan Dan Pemerataan Dalam Pembagian Bantuan Langsung Tunai Di Desa Paseban**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi asas keadilan dalam pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Paseban sudah berusaha diwujudkan melalui kriteria penerima yang ditetapkan pemerintah, seperti masyarakat miskin, dan yang kehilangan pekerjaan. Namun, pada praktiknya masih ditemukan beberapa kendala, seperti adanya keluarga yang secara ekonomi tergolong mampu tetapi tetap menerima bantuan, sementara sebagian masyarakat miskin yang lebih membutuhkan justru tidak mendapatkan haknya. Hal ini menandakan bahwa asas keadilan belum sepenuhnya terlaksana secara ideal, meskipun aparat desa telah melakukan pendataan dan verifikasi sesuai arahan pemerintah pusat.

Asas keadilan dalam Islam menekankan pentingnya memberikan hak kepada yang berhak serta menghindari diskriminasi. Konsep keadilan (*'adl*) menghendaki agar distribusi bantuan diberikan sesuai kebutuhan, bukan berdasarkan kedekatan atau kepentingan politik. Dalam konteks Desa Paseban, ketidaktepatan sasaran sebagian besar dipengaruhi oleh keterbatasan kuota bantuan dari pemerintah, sehingga aparat desa harus memilih penerima meskipun banyak warga yang membutuhkan.

Menurut teori keadilan distributif John Rawls, keadilan menuntut agar distribusi sumber daya harus berpihak pada kelompok yang paling kurang beruntung dalam masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan asas pemerataan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, bahwa bantuan sosial

harus didistribusikan secara adil, transparan, dan akuntabel.

Dari sisi pemerataan, distribusi BLT di Desa Paseban pada dasarnya sudah mencakup seluruh dusun sehingga setiap wilayah desa memperoleh jatah penerima bantuan. Namun, jumlah penerima di tiap dusun tidak selalu sebanding dengan jumlah penduduk miskin yang ada. Akibatnya, sebagian masyarakat menilai pembagian bantuan masih menimbulkan rasa ketidakpuasan. Prinsip pemerataan belum sepenuhnya tercapai karena keterbatasan kuota dan anggaran yang diberikan pemerintah, sehingga menimbulkan ketimpangan antarwarga desa.

Konsep pemerataan dalam ekonomi Islam identik dengan musawah, yakni kesetaraan dalam memperoleh hak dasar tanpa membedakan suku, status sosial, maupun kedekatan dengan aparat desa. Oleh karena itu, asas pemerataan seharusnya tidak hanya dilihat dari segi wilayah, tetapi juga dari segi kebutuhan masyarakat. Dalam praktik di Desa Paseban, pemerataan secara wilayah memang tercapai, tetapi pemerataan berdasarkan kebutuhan masyarakat miskin belum sepenuhnya terwujud.

Penelitian terdahulu oleh Sari yang menyatakan bahwa ketidakakuratan data dan kurangnya transparansi dalam proses penyaluran BLT seringkali menjadi faktor utama munculnya ketidakadilan. Hal ini relevan dengan temuan di Desa Paseban, di mana kendala pendataan menjadi masalah pokok dalam implementasi asas keadilan dan pemerataan.

#### **b. Dampak Ekonomi Penerimaan Bantuan Terhadap Masyarakat**

BLT terbukti memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat miskin di Desa Paseban, meskipun hanya bersifat sementara. Bantuan ini membantu keluarga penerima untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, mengurangi tekanan ekonomi, dan menjaga daya beli masyarakat. Namun, keterbatasan jumlah bantuan membuat program ini belum mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Menurut teori Keynesian, intervensi pemerintah melalui transfer langsung kepada masyarakat berpendapatan rendah dapat meningkatkan konsumsi dan menggerakkan ekonomi lokal. Hal ini juga berlaku pada BLT di Desa Paseban, di mana dana bantuan digunakan terutama untuk konsumsi kebutuhan pokok.

Penelitian oleh Pratama, mengungkapkan bahwa BLT memberikan dampak positif dalam menjaga daya beli masyarakat miskin di tengah krisis ekonomi, namun penelitian tersebut juga menekankan bahwa distribusi yang tidak merata dapat menimbulkan kecemburuan sosial serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Hal ini sejalan dengan penelitian ini, di mana BLT terbukti membantu masyarakat miskin yang tepat sasaran, tetapi sekaligus menimbulkan ketidakpuasan bagi mereka yang layak namun tidak terdata.

#### **c. Cara Menanggulangi Ketidakmerataan Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam**

Dalam perspektif ekonomi Islam, distribusi harta harus berlandaskan keadilan (al-'adl), kemaslahatan (maslahah), dan pemerataan (al-musawah). Untuk menanggulangi ketidakmerataan dalam penyaluran BLT, perlu adanya perbaikan mekanisme pendataan dengan prinsip amanah dan kejujuran, serta pelibatan masyarakat dalam proses verifikasi agar tercipta transparansi.

Al-Qur'an Surah Al-Hasyr ayat 7 menegaskan bahwa "harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu." Prinsip ini sejalan dengan tujuan BLT, yaitu agar bantuan negara dapat menjangkau kelompok masyarakat miskin.

Penelitian terdahulu oleh Hasanah yang menekankan bahwa distribusi bantuan sosial dalam perspektif Islam harus dilakukan dengan pendekatan musyawarah (syura) dan integrasi dengan instrumen zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Hal ini bertujuan agar bantuan

tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif, sehingga mampu mengurangi ketidakmerataan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Paseban telah berusaha mengimplementasikan asas keadilan dan pemerataan dalam pembagian BLT, meskipun masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya. Untuk meningkatkan efektivitas program, beberapa langkah dapat dilakukan, antara lain: memperbaiki sistem pendataan dengan memanfaatkan teknologi digital, memperkuat musyawarah desa dalam menentukan penerima, serta melakukan pengawasan agar tidak terjadi penyelewengan. Selain itu, perlu adanya kebijakan integrasi antara BLT dengan program pemberdayaan ekonomi, sehingga masyarakat tidak hanya terbantu secara sementara tetapi juga mampu meningkatkan kemandirian ekonomi dalam jangka Panjang.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Asas Keadilan dan Pemerataan dalam Pembagian Bantuan Langsung Tunai di Desa Paseban Tebo, dapat disimpulkan bahwa :

Penerapan asas keadilan pada dasarnya sudah diupayakan dengan menyalurkan bantuan kepada keluarga yang membutuhkan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kendala berupa ketidaktepatan sasaran akibat keterbatasan data serta adanya perbedaan persepsi masyarakat mengenai kriteria penerima. Sementara itu, asas pemerataan juga telah diimplementasikan melalui distribusi bantuan tanpa diskriminasi, tetapi masih terdapat kasus tumpang tindih penerima dengan program bantuan lain, bahkan ada keluarga yang sebenarnya berhak tetapi tidak terdata. Meskipun demikian, keberadaan BLT terbukti memberikan dampak positif dalam mengurangi beban ekonomi masyarakat miskin dan membantu meningkatkan daya beli mereka, meskipun belum sepenuhnya berjalan secara adil dan merata.

BLT dapat memberikan dampak positif berupa peningkatan daya beli masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari. Bantuan ini juga meringankan beban keluarga miskin di tengah keterbatasan ekonomi. Namun, dampak tersebut hanya bersifat jangka pendek karena bantuan tidak mampu sepenuhnya mengubah kondisi ekonomi masyarakat menjadi lebih mandiri. Dengan demikian, BLT lebih berperan sebagai instrumen darurat dibandingkan solusi permanen dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Dalam perspektif Ekonomi Islam, penanggulangan ketidakmerataan dapat dilakukan dengan meningkatkan transparansi dan kejujuran dalam pendataan, melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses verifikasi, serta memastikan distribusi bantuan sesuai asas keadilan (*al-'adl*) dan amanah (*al-amānah*). Prinsip syura (*musyawarah*) juga penting diterapkan agar keputusan mengenai penerima bantuan tidak hanya bersifat top-down, melainkan juga mendapat legitimasi dari masyarakat. Dengan cara ini, distribusi BLT dapat lebih merata, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Afifa Rangkuti, Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam, Tazkiya, Vol. 4 No. 1, (2020)
- Arifin, Syamsul, Soesatyo, Y. (2020) 'Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran dan Konsumsi dalam Bingkai Kesejahteraan Masyarakat', Pena Persada, pp. 1-172.
- Alma, Buchari. 2019. Guru Profesional Menguasai Metode dan Terampil Mengajar. Bandung: Alfabeta
- Arikunto, Suharsimi. 2020. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Abul A'la Al-Maududi, Masalah Ekonomi dan Pemecahannya Menurut Islam, (Jakarta: Media Da'wah, 2020), h.45

- Ainulyaqin, M., Edy, S., Rakhmat, A., & Wulandari, M. (n.d.). Peran Program Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Masa Pandemi Dalam Perspektif Ekonomi Islam..
- Ainulyaqin, M., Edy, S., Rakhmat, A., & Wulandari, M. (n.d.). Peran Program Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Masa Pandemi Dalam Perspektif Ekonomi Islam.
- Fauzatul Laily Nisa (2024) tentang Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam.
- Hanura Siti. 2019. Otonomi Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Baruta Lestari Kecamatan Sangia Wambulu Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Husni, Indra Sholeh, Konsep Keadilan Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi: Sebuah Kajian Konseptual. *Islamic Economics Journal*, Vol 6 No.1 (2020)
- John Rawls, *A Theory of Justice*, (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hlm. 75.
- John Maynard Keynes, *The General Theory of Employment, Interest, and Money*, (London: Palgrave Macmillan, 1936), hlm. 85.
- Kementerian Sosial RI, *Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial Tunai*, (Jakarta: Kemensos, 2020), hlm. 10.
- Listyaningsih, U. and Kiswanto, E. (2019). Bantuan Langsung Tunai Mengatasi Masalah dengan Masalah. *Populasi*, 20(1), Pp.13-26
- Markhamah (2021) Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal. 1st edn. Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press.
- Mubarak, Zaki, 2021, *al-Akhlak 'ind Al-Ghazali*, Mesir: Dar al-Katib al-Araby alThba'at al-Nasyr.
- Nurfadilah, Sumanta, Maimun, M., Yahya, M., & Muttaqin, M. Z. 2023. Konsepsi Aktualisasi Diri untuk Mencapai Derajat Ihsan: Studi Penafsiran QS. ArRahman Ayat 60 dengan Pendekatan Ma'na Cum Maghza. *Gunung Djati Conference Series*, 21, 197–112.
- Nurhayati, C., Si, M. and Prihatin, R.B. (2018) 'BUMDes dan Kesejahteraan Masyarakat Desa'.
- Nurul Latifah, D. (n.d.). Dampak bantuan langsung tunai (blt) dana desa terhadap pelaku usaha kecil menengah pada masa covid-19 di kecamatan krueng barona jaya kabupaten aceh besar. *Bantuan langsung tunai, Usaha Kecil Menengah, Covid-19*.
- peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Bantuan Sosial Tunai.
- Rahardja, Prathama dan Mandala Manurung. 2021. *Teori Ekonomi Mikro; Suatu Pengantar*, Edisi Keempat. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Rawl, John, *Teori Keadilan*, terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Rizal, A. (n.d.). Pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa ( blt dd )Pada masa pandemi covid-19 kabupaten Sidrap.
- Sofi, I. (2021). Efektivitas bantuan langsung tunai dana desa dalam pemulihan ekonomi di desa.
- Sugiyono. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. (Bandung, Alfabeta : 2019), hlm.97.
- Wing Redy Prayuda, *Keadilan Ekonomi Dalam Perspektif Hukum Islam*, Al Mustashfa, Vol. 2, No. 1, (2019)
- Widyakso, Rendra, *Konsep Keadilan Menurut Al Qur'an*, badilag.mahkamahagung.go.id,(<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/konsepkeadilan-menurut-al-qur-an-rendra-widyakso-sh-12-7>) diakses 12/7/2019
- Jurnal :
- Amirus Sodiq, "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam". *Jurnal EQUILIBRIUM*, Vol. 3 No. 2 (Desember 2019), h. 95.
- Ambok Pangiuk, (2018) "PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENURUNAN KEMISKINAN DI PROVINSI JAMBI TAHUN 2009-2013", *Journal Of Shariah Economic Research*, Vol. 2, No. 2.
- Achmad Fajri Ramadhan, Dr Arsa, Agustina Mutia, Victor Diwantara, "ANALISIS DAN POTENSI ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN MUSTAHIK STUDI KASUS (BAZNAS KOTA JAMBI)" *Jurnal Kajian dan Penalaran Ilmu Manajemen* Vol.1, No.4 Oktober 2023
- Agustina Mutia, Muhammad Orinaldi, M Hasan, "Analisis Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung

- Jabung Barat”, *Jurnal Publikasi Manajemen Informatika*, Vol.2, No.3 (2023), hal.62.
- Bambang Kurniawan, “Analisis Keterhubungan Tingkat Kemiskinan Dan Pembiayaan Syariah Di Indonesia Tahun 2005-2020”, *Journal of Shariah Economic Research*, Vol. 5, No.2(2021), hal.225.
- Behy Rosalia, Usdeldi, Sri Rahma, “ANALISIS PENENTUAN KRITERIA MISKIN SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT PADA BAITUL MAL MASJID NURUL HUDA DESA KELUMPANG JAYA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA”*Jurnal AL FIDDHOH VOL. 4 (1) MARET 2023*.
- Bambang Kurniawan, Agusriandi Agusriandi “Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Ikan Hias Di Desa Rantau Rasau Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur” *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis* Vol. 1, No. 4 Oktober 2023.
- Dewi Sartika, Dessy Anggraini, Munsarida, “PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM MENGURANGI KEMISKINAN MELALUI PROGRAM PEMBIAYAAN MIKRO DI KOTA JAMBI” *Journal Of Islamic Banking* Vol. 5 No. 1 Tahun 2025, pp. 160-174
- Dr. Usdeldi, Eri Nofriza, “ANALISIS PENGELOLAAN DANA HAJI PADA MASA PANDEMI COVID 19 PADA KEMENTERIAN AGAMA DI KOTA JAMBI” *urnal Kajian dan Penalaran Ilmu Manajemen* Vol.1, No.4 Oktober 2023.
- Damanik, H. H., & Arfa, F. A. 2023. Keadilan Perspektif Filsafat Hukum dan Islam. *Journal of Comprehensive Science*, 2(2), 34–42. <https://jurnal.wu-93> *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* Vol 5 No 2 Agustus 2024, ISSN: 2745-8407
- Eja Armaz Hardi, “ANALISIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MUSLIM MISKIN MELALUI QARDUL HASAN”
- Fadila Mawaddah, Addiarrahman, Fauzan Ramli, “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, *Jurnal Manajemen* Vol. 1, No. 4 November 2023
- Hasanah, Nur. “Distribusi Bantuan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 14, No. 2, 2022, hlm. 210.
- Herdiana, Dian, et al. "Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 di Kabupaten Sumedang: Isu dan Tantangan." *Jurnal Inspirasi* 12.1 (2021): 1-16
- Huda, N. (2021). “Keadilan Sosial dalam Perspektif Islam dan Implementasinya dalam Kebijakan Bantuan Sosial”. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 9(1), 77–89.
- Nurfritri Martaliah, Efni Anita, Fuad Rahman, Luthfi Naufal ramli, “engaruh Penyaluran Dana Zakat dan IPM Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jambi” *Jurnal Indonesian Journal of Islamic Economics and Business* Volume 8, Number 2, December 2023, 334-344
- Putri, R. N. (2022). Dampak Ekonomi Bantuan Langsung Tunai terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 13(2), 45-56.
- Putri, R. N. (2020). Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), Pp.705-709.
- Putri Apria Ningsih, “ANALISIS EFEKTIFITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN DI KELURAHAN SIMPANG III SIPIN KOTA JAMBI”, *Jurnal Studi Multidisipliner*, Vol 8 No. 6 Juni 2024. Hal, 1254.
- Pratama, R. (2020). Dampak BLT terhadap Ekonomi Rumah Tangga di Masa Pandemi. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 7(3), hlm. 210.
- Rafidah, “EKONOMI ISLAM DALANI SISTEM EKONOMI INDONESIA” , *jurnal ekonomi*, vol.25 no.1 ( 2019), hal.18
- Rika Susanti, Arsa, Ahsan Putra Hafiz, Rohana, “Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Sengkati Baru Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari” : *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif*, Vol. 1, No. 2 (2023), hal.203.
- Ramadhan, Fikri. “Dampak Bantuan Sosial terhadap Ekonomi Rumah Tangga Miskin di Masa Pandemi COVID-19.” *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 12, No. 1, 2020, hlm. 33.
- Sriwahyuni, Nasution, M. Y., & Sugianto. 2023. Konsep Keadilan Ekonomi Islam. *Al-Mada: Jurnal Agama Sosiasl Dan Budaya*, 6(2), 22–32. <https://doi.org/10.31538/almada.v6i2.3184>.

- Sumirat, I. R. (2021). Penegakan Hukum Dan Keadilan Dalam Bingkai Moralitas Hukum. *Al Qisthas Jurnal Hukum Dan Politik*, 11(2), 86–100.
- Sari, Dewi. “Analisis Distribusi Bantuan Langsung Tunai di Masa Pandemi.” *Jurnal Kebijakan Sosial*, Vol. 5, No. 2, 2021, hlm. 114.
- Tasbir, M. K., Muin, R., & Lutfi, M. 2022. Distribusi dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonometriks (Ekonomi, Manajemen, Akuntansi)*, 5(2), 44–51.